MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLEMENTASI E-BUDGETING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DAN KORUPSI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Nurliana Nasution[1], Putri Halima Tanjung[2], Riska Rahayu Ritonga[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Sumatera Utara
nurliananasution51@gmail.com[1] , riskaritonga16@gmail.com[2] , putrihalimatanjung@gmail.com[3]

Abstract
This study aims to examine the implementation of the e-budgeting system as a tool to prevent corruption and fraud in local government budget management. The transition from a manual budgeting system to a digital one is expected to improve transparency, data accuracy, and public accountability. This study employed a descriptive qualitative method by analyzing documents, conducting interviews with local finance officials, and observing the budget planning and approval process. The results indicate that e-budgeting can reduce the possibility of document manipulation, arbitrary budget additions, fraudulent expenditures, and intervention by various parties because the entire process is digitally recorded and traceable. Furthermore, the use of a digital system in budget management also facilitates data integration from planning, procurement, and performance reporting, thus facilitating internal and public oversight. However, the study also identified several obstacles, such as a lack of technological facilities, resistance from bureaucrats, and low human resource capacity in using the system. Overall, e-budgeting has great potential to become a strategic tool in promoting more transparent, accountable, and corruption-free local financial management, as long as it is supported by strong political commitment, a strict oversight system, and increased capacity of officials.

Keywords: e-budgeting, fraud, corruption, regional budget, transparency, accountability

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan sistem e-budgeting sebagai alat untuk mencegah tindakan korupsi dan fraud dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Perpindahan dari sistem penganggaran manual ke sistem digital diharapkan bisa meningkatkan transparansi, keakuratan data, serta akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara menganalisis dokumen, melakukan wawancara dengan pejabat keuangan daerah, serta mengamati proses perencanaan dan pengesahan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-budgeting bisa mengurangi kemungkinan adanya manipulasi dokumen, penambahan anggaran secara sembarangan, pengeluaran palsu, serta intervensi para pihak karena seluruh prosesnya tercatat secara digital dan bisa dilacak. Selain itu, penggunaan sistem digital dalam mengelola anggaran juga memudahkan integrasi data dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan kinerja, sehingga memberi kemudahan dalam pengawasan internal maupun publik. Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya fasilitas teknologi, resistensi dari birokrat, serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem tersebut. Secara keseluruhan, e-budgeting memiliki potensi besar menjadi alat strategis dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, selama didukung oleh komitmen politik yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, serta peningkatan kapasitas para pejabat.

Kata kunci: **e-budgeting, fraud, korupsi, anggaran daerah, transparansi, akuntabilitas**

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. Pendahuluan

Pengelolaan anggaran menjadi bagian penting yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Anggaran publik tidak hanya dipakai untuk merencanakan pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang membantu memastikan penggunaan uang negara berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, di lapangan, proses penyusunan dan pengelolaan anggaran masih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, seperti kecurangan dalam dokumen, penambahan nilai belanja, transaksi palsu, serta kolusi antara birokrasi dan pihak luar. Berbagai kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan tradisional masih manual, tertutup, dan kurang diawasi oleh masyarakat.

Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah daerah mulai menerapkan sistem E-Budgeting sebagai solusi digital dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
E-budgeting diharapkan bisa mengintegrasikan seluruh proses, mulai dari perencanaan program, alokasi belanja, hingga pelaporan hasil. Sistem ini memungkinkan pencatatan berbasis data, melacak perubahan anggaran secara langsung, serta melibatkan seluruh lembaga daerah. Digitalisasi anggaran dianggap bisa mengurangi ruang gelap dalam pengambilan keputusan, mengurangi campur tangan pribadi, serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran umumnya terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi, kelemahan pengelolaan dokumen, tekanan politik, serta mekanisme pengawasan yang tidak memadai. Dalam teori Fraud Triangle, kecurangan terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan kemampuan untuk merasa lega. Sistem manual memberi peluang luas untuk mengubah dokumen, memalsukan angka, menghilangkan jejak perubahan, dan mengatur transaksi palsu melalui prosedur birokrasi yang panjang. Dengan menerapkan e-budgeting, peluang tersebut diharapkan menjadi lebih terbatas karena setiap aktivitas tercatat, memiliki jejak digital, dan bisa dianalisis secara rapi.

Selain itu, dalam kerangka teori Agency, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola keuangan atas nama masyarakat sebagai pemilik. Jika pengawasan lemah, agen bisa menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti memperbesar proyek, korupsi bersama, atau kolusi. E-budgeting dirancang untuk menyamakan informasi antara pemilik dan agen dengan meningkatkan terbukanya data ke masyarakat.

Implementasi e-budgeting juga berkaitan erat dengan prinsip Good Governance, terutama di bidang transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Sistem ini mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan, kesadaran disiplin fiskal, serta pengambilan keputusan dari bawah yang dapat dikonfirmasi. Beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang baik, seperti kecepatan pengesahan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan pengadaan, serta integrasi dengan sistem pelaporan kinerja.

Namun, keberhasilan e-budgeting tidak terjadi sendirinya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hambatan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, ketidak siapan aparatur terhadap perubahan sistem kerja, rendahnya pelatihan tenaga kerja, pembiayaan teknologi yang kurang memadai, serta pengaruh budaya birokrasi yang masih bergantung pada hubungan pribadi. Selain itu, komitmen politik dari kepala daerah dan integrasi sistem dengan lembaga pengawasan menjadi faktor penting. Tanpa keinginan yang serius untuk mereformasi birokrasi, e-budgeting bisa hanya menjadi formalitas digital tanpa manfaat kontrol yang nyata.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam peran e-budgeting sebagai upaya mencegah tindakan penggelapan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini akan melihat bagaimana sistem bekerja, manfaat yang diperoleh, mekanisme pengendalian yang muncul, serta hambatan yang dihadapi selama proses penerapannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dalam studi pengelolaan keuangan publik sekaligus memberikan saran kebijakan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran berbasis teknologi.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami secara dalam mengenai proses penerapan e-budgeting dalam upaya mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan anggaran di pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih agar peneliti bisa menggali informasi secara luas, memahami dinamika yang terjadi dalam lingkungan birokrasi, serta memahami pengalaman para pekerja pemerintahan dalam menggunakan sistem penganggaran berbasis elektronik.

Lokasi penelitian difokuskan pada pemerintah daerah yang sudah menerapkan e-budgeting dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran, baik pada tahap perencanaan, alokasi, maupun pelaporan. Subjek penelitian meliputi pejabat keuangan daerah, operator sistem di organisasi perangkat daerah, auditor atau inspektorat internal, serta anggota legislatif yang terlibat dalam diskusi anggaran. Keberagaman dari subjek ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai efektivitas sistem dalam mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan utama untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang fungsi e-budgeting, bentuk pengendalian yang ada, manfaat yang dirasakan, serta hambatan dalam penerapannya. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pengisian data, alur verifikasi, hingga mekanisme persetujuan dalam sistem, sehingga memastikan bahwa prosedur formal sesuai dengan praktik yang dijalankan. Data berupa pedoman penggunaan e-budgeting, laporan APBD, catatan keuangan, serta dokumen kebijakan daerah juga dianalisis sebagai bahan perbandingan dan verifikasi tambahan.

Pengolahan data dilakukan secara interaktif sesuai model Miles dan Huberman, yaitu dengan mengecilkan data menjadi makna-makna yang mendasar, menyusunnya dalam bentuk narasi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

topik, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, serta informasi, serta melalui proses konfirmasi ulang kepada para informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan bisa menghasilkan gambaran jelas mengenai bagaimana e-budgeting berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap korupsi dan penyalahgunaan anggaran, bagaimana para pekerja birokrasi merespons perubahan cara kerja, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi sukses atau tidaknya penerapan e-budgeting di tingkat pemerintah daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting mampu mengubah cara penyusunan dan pengendalian anggaran pemerintah daerah dari proses manual yang tertutup menjadi sistem digital yang lebih transparan. Dengan menggabungkan proses perencanaan, penginputan program, hingga persetujuan anggaran melalui platform elektronik, setiap perubahan data dapat tercatat secara otomatis. Hal ini membuat kemungkinan adanya manipulasi dokumen, penambahan belanja tidak sah, serta kegiatan yang tidak nyata semakin berkurang. Jejak audit yang muncul setiap kali ada revisi anggaran menjadi alat kontrol penting karena identitas pengguna, waktu akses, dan alasan perubahan dapat dicek kapan saja oleh auditor internal maupun pihak legislatif.

Selain meningkatkan transparansi, e-budgeting juga membantu memperkuat akuntabilitas dalam birokrasi karena data anggaran harus sesuai dengan standar biaya dan pagu yang sudah ditentukan.Dengan demikian, ruang untuk negosiasi informal dan intervensi politis menjadi lebih terbatas. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan e-budgeting, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan jaringan, serta tingkat kemampuan aparatur yang masih bervariasi. Beberapa pegawai menunjukkan resistensi karena terbiasa menggunakan sistem manual dan belum paham manfaat dari kontrol digital.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan e-budgeting tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga tergantung pada komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, serta pelatihan bagi pegawai.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Secara keseluruhan, digitalisasi anggaran melalui e-budgeting telah terbukti menjadi alat pencegahan yang mampu mengurangi risiko praktik korupsi dan kecurangan, sekaligus memperkuat prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Integrasi Proses Perencanaan dan Penganggaran melalui Sistem E-Budgeting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting telah mengubah cara penyusunan anggaran dari sistem manual yang terpecah menjadi proses digital yang terintegrasi. Semua tahapan dalam penyusunan anggaran, mulai dari pengajuan usulan program oleh organisasi perangkat daerah, diskusi bersama TAPD, hingga persetujuan legislatif, dicatat secara elektronik sehingga memudahkan pencarian dokumen anggaran. Integrasi ini terlihat dari kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, dan APBD, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian angka atau perpindahan pos belanja di akhir pembahasan. Dengan demikian, e-budgeting berperan sebagai fondasi awal tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Peningkatan Transparansi dan Jejak Digital sebagai Cara Mencegah Fraud

Temuan lain menunjukkan bahwa adanya jejak digital (audit trail) menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko fraud dan manipulasi.Setiap perubahan angka, revisi program, atau pergeseran alokasi anggaran dicatat otomatis dalam sistem, termasuk identitas pengguna, waktu akses, dan alasan perubahan. Kondisi ini membuka ruang negosiasi informal, transaksi politik, atau intervensi personal yang sulit dilakukan tanpa meninggalkan bukti digital.

Dalam pengendalian internal, sistem ini memperkuat fungsi pengawasan secara real-time karena auditor bisa mengevaluasi konsistensi perencanaan dan realisasi tanpa menunggu laporan akhir tahun. Transparansi ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan secara daring, sehingga menambah tekanan sosial terhadap penyimpangan.

Penurunan Peluang Mark-Up, Kegiatan Fiktif, dan Manipulasi Dokumen

Digitalisasi anggaran terbukti mengurangi jenis fraud yang sebelumnya muncul dalam sistem manual, seperti penggelembungan biaya, penyusunan kegiatan tanpa hasil nyata, serta pengulangan item belanja yang tidak relevan. Sistem e-budgeting menggunakan struktur kode

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

belanja dan batasan pagu yang otomatis, sehingga operator tidak bisa menambahkan item tanpa mengacu pada standar biaya umum dan analisis kebutuhan. Pada beberapa kasus, kontrol ini mencegah manipulasi proyek strategis karena nilai anggaran harus sesuai dengan data harga satuan. Selain itu, kegiatan fiktif menjadi sukar dilakukan karena seluruh dokumen harus selaras dengan database program pembangunan daerah.

Keterbatasan Sumber Daya Teknologi dan Kemampuan Petugas

Meskipun e-budgeting membentuk mekanisme pencegahan fraud, penelitian juga menemukan bahwa pengimplementasiannya masih menghadapi hambatan. Salah satu tantangan adalah keterbatasan infrastruktur dan stabilitas jaringan, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas teknologi memadai. Operator sering mengalami gangguan saat menginput data atau mengunggah dokumen, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan.

Selain itu, tidak semua petugas memiliki kemampuan digital yang baik; beberapa masih terbiasa bekerja secara manual dan menunjukkan penolakan terhadap sistem baru. Penolakan itu bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga akibat budaya birokrasi yang lebih mengutamakan hubungan pribadi.

Pengaruh Komitmen Politik dan Dukungan Regulasi terhadap Efektivitas Sistem

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan e-budgeting tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada tingkat komitmen pemimpin daerah sebagai pewaris kebijakan.Di tempat yang memiliki niat yang kuat untuk mengurangi korupsi, e-budgeting digunakan secara teratur, didukung dengan pelatihan pegawai, diselaraskan dengan sistem e-procurement, serta diperiksa secara rutin melalui audit internal.

Sebaliknya, jika komitmen politik tidak kuat, maka sistem e-budgeting hanya digunakan sebagai bentuk formalitas administratif dan tidak berfungsi sebagai alat kontrol yang nyata. Dukungan dari peraturan daerah juga memengaruhi efektivitas penerapan e-budgeting, terutama dalam hal menegaskan sanksi bagi penyimpangan prosedur, menetapkan standar kerja, dan sistem keuangan antar lembaga.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kontribusi E-Budgeting terhadap Prinsip Good Governanc

Pembahasan menunjukkan bahwa e-budgeting memberikan kontribusi langsung terhadap penerapan prinsip good governance.Transparansi meningkat seiring dengan kemudahan akses publik terhadap informasi anggaran; akuntabilitas diperkuat melalui dokumen digital dan laporan yang berbasis data; efektivitas meningkat karena perencanaan anggaran bisa disesuaikan dengan hasil kinerja program; dan efisiensi tercapai melalui pengurangan duplikasi dokumen serta percepatan proses persetujuan. Proses digitalisasi juga memperkuat peran instansi pengawas dan lembaga eksternal karena data bisa diperiksa kapan saja tanpa menunggu laporan fisik.

Implikasi Temuan bagi Pencegahan Korupsi Anggaran Daerah

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa e-budgeting tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga bagian dari strategi pencegahan korupsi yang menekan salah satu faktor utama dalam Fraud Triangle, yaitu peluang (opportunity). Meskipun sistem ini tidak bisa menghilangkan tekanan atau alasan rasionalisasi penyimpangan, tetapi mengurangi ruang untuk melakukan manipulasi sehingga tingkat risiko pelaku terdeteksi meningkat. Integrasi sistem e-budgeting dengan e-procurement dan e-monitoring membuka peluang pengawasan menyeluruh terhadap siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan. Dengan demikian, e-budgeting tidak hanya sebagai alat pencegahan, tetapi juga melengkapi fungsi penegakan hukum yang bersifat represif.

Implementasi Sistem Digital sebagai Penguat Transparansi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting berperan dalam memperkuat transparansi dalam proses pembuatan anggaran di pemerintahan daerah. Sistem digital mengizinkan seluruh tahapan perencanaan serta pendistribusian dana tercatat secara elektronik, sehingga perubahan angka dan revisi program tidak bisa dilakukan tanpa meninggalkan jejak siapa yang melakukan perubahan tersebut.

Hal ini meminimalkan ruang bagi adanya kesepakatan informal atau kompromi politik yang sebelumnya sering berlangsung dalam sistem penganggaran manual. Transparansi ini juga menjadi dasar untuk pengawasan oleh masyarakat dan auditor internal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pengurangan Peluang Penyimpangan melalui Jejak Audit Digital

Temuan lainnya menunjukkan bahwa kehadiran fitur audit trail dalam e-budgeting menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah tindakan korupsi, seperti penambahan nilai, pengalihan alokasi dana, serta pembuatan kegiatan yang tidak nyata. Identitas pengguna, waktu login, dan alasan perubahan secara otomatis tercatat, sehingga setiap upaya manipulasi dapat cepat ditemukan. Dengan demikian, e-budgeting berfungsi sebagai alat pencegahan yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan anggaran.

Tantangan Infrastruktur dan Keterampilan Aparatur

Meskipun manfaatnya jelas, efektivitas e-budgeting bergantung pada kesiapan sistem teknologi dan kemampuan aparatur. Beberapa petugas masih menghadapi masalah koneksi internet serta kurangnya perangkat, yang memperlambat proses pengisian data. Di sisi lain, sebagian besar aparatur belum sepenuhnya mengerti manfaat kontrol digital, sehingga masih memperlihatkan sikap kritis terhadap perubahan dalam prosedur kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa proses transformasi digital memerlukan dukungan pelatihan, bimbingan, dan penyesuaian budaya kerja birokrasi.

Dukungan Kebijakan sebagai Faktor Penentu Keberhasilan

Pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan e-budgeting dapat berjalan optimal jika didukung oleh komitmen politik dari pemimpin daerah serta adanya regulasi pengawasan yang jelas. Daerah yang rutin melakukan evaluasi, memiliki standar operasional, dan memberikan sanksi atas pelanggaran prosedur cenderung mendapatkan hasil yang lebih besar. Sebaliknya, jika e-budgeting hanya dijalankan untuk memenuhi tuntutan administratif, maka sistem tidak berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi secara efektif.

Kontribusi terhadap Pencegahan Kecurangan dan Prinsip Good Governance

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa e-budgeting memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengurangi peluang kecurangan melalui pengurangan kebebasan mengubah data, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan akses informasi anggaran yang lebih terbuka. Hal ini selaras dengan penerapan prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, e-budgeting bukan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

hanya inovasi teknologi informasi, tetapi juga alat reformasi birokrasi yang membawa pemerintahan daerah menuju pengelolaan anggaran yang lebih bersih dan terukur.

4.Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan e-budgeting memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Proses perencanaan dan penganggaran yang didigitalisasi mengubah cara kerja birokrasi dari sistem manual yang rentan diubah secara sembarangan menjadi mekanisme berbasis data yang transparan dan bisa dipantau. Setiap perubahan dalam alokasi anggaran, revisi kegiatan, atau penyesuaian pengeluaran akan tercatat secara otomatis melalui jejak audit digital, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya penambahan nilai secara ilegal, penyusunan kegiatan palsu, atau campur tangan politik dari awal proses perencanaan. Dengan demikian, e-budgeting berperan sebagai alat pencegahan yang mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan anggaran karena sistem ini menghilangkan celah untuk praktik tidak resmi yang sulit terdeteksi pada sistem manual.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan e-budgeting tidak hanya tergantung pada tingkat teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, komitmen politik pemerintah daerah, serta dukungan dari regulasi pengawasan.

Masalah teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan peralatan, serta ketidaksiapan budaya birokrasi, bisa menghambat efektivitas sistem apabila tidak didukung oleh pelatihan dan perubahan cara kerja. Namun, di daerah yang memiliki dukungan kebijakan dan pengawasan yang kuat, implementasi e-budgeting terbukti meningkatkan keakuratan pengelolaan keuangan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendorong prinsip pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, e-budgeting bukan hanya inovasi dalam administrasi, tetapi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada transparansi, efisiensi, serta pencegahan korupsi Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penerapan standar operasional yang jelas, integrasi dengan sistem pengadaan, serta komitmen dari pemimpin menjadi faktor utama untuk memastikan sistem ini berjalan baik dan menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan anggaran publik

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

Arifianti, R., & Pratolo, S. (2020). *Pengaruh penerapan e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 11(2), 145-158.

Aziz, A. (2019). *Good governance dan pencegahan korupsi di sektor publik*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 55-68.

Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Firmansyah, A., & Rahmawati, D. (2021). *Sistem e-budgeting dan efektivitas pengendalian internal pada pemerintah daerah*. Jurnal Riset Akuntansi, 13(1), 33-47.

Halim, A., & Kusufi, M. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat.

Hanafi, R. (2020). *E-Government, e-budgeting, dan reformasi administrasi publik*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 5(3), 201-214.

Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren korupsi anggaran daerah dan evaluasi mekanisme pengawasan*. ICW Report.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Pedoman umum penerapan sistem e-planning dan e-budgeting daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Sofyani, H., & Riyadh, M. (2020). *Peran audit internal dalam mencegah fraud di pemerintahan daerah*. Jurnal Akuntabilitas, 13(1), 77-94.

Suhardjanto, D., & Lesmana, R. (2021). *Transparansi, partisipasi publik, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 8(2), 112-129.

Transparency International. (2021). *Global corruption report: Public sector accountability*. TI Secretariat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo, J. (2019). *Analisis kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan*. UGM Press.